

VARIABEL-VARIABEL YANG MEMENGARUHI KETIDAKTUNTASAN PENDIDIKAN PEREMPUAN PROVINSI NTB TAHUN 2019

Ummu Kaltsum^{1)*}, Yaya Setiadi²⁾

Politeknik Statistika STIS

Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13330

email: ¹⁾ 111810638@stis.ac.id, ²⁾ setiadi@stis.ac.id

Abstrak

Ketimpangan pendidikan menurut gender merupakan salah satu permasalahan di negara berkembang tak terkecuali Indonesia, dimana tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Peningkatan pada pendidikan perempuan memberikan banyak keuntungan, di antaranya dari segi ekonomi, perbaikan kesehatan rumah tangga hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia anak. Berdasarkan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan menurut gender di Provinsi NTB tahun 2019, jenjang SMA/ sederajat menunjukkan perbedaan persentase yang paling besar, dimana persentase perempuan yang menamatkan jenjang SMA/ sederajat masih tertinggal. Selain itu, rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan Provinsi NTB jauh lebih rendah dari angka RLS perempuan nasional. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga menunjukkan bahwa target pemerintah dalam program wajib belajar 12 tahun belum terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun pada perempuan di Provinsi NTB tahun 2019 menggunakan metode analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kemiskinan rumah tangga, daerah tempat tinggal, jumlah ART, jenis kelamin KRT, tingkat pendidikan KRT, lapangan usaha KRT kategori pertanian serta status pernikahan dini berpengaruh signifikan terhadap ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun pada perempuan.

Kata Kunci: *Ketidaktuntasan Wajib Belajar, Pendidikan Perempuan, Regresi Logistik Biner*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu masyarakat dapat dinilai dengan mengukur isu-isu yang memperluas ketimpangan pendidikan. Prevalensi distribusi pendidikan yang tidak merata pada laki-laki dan perempuan dapat menghambat pembangunan. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk dididik, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Salah satu permasalahan yang mengakar ialah pembatasan-pembatasan yang dirasakan oleh perempuan dalam memperoleh pendidikan, mengakibatkan perempuan tidak dapat memajukan kapasitas dan potensi dirinya.

Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas pasar kerja dan pertumbuhan pendapatan. Lebih dari itu, pendidikan bagi perempuan juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial yang tidak selalu diukur oleh pasar. Tingkat pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas perempuan di rumah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan keluarga, kelangsungan hidup anak, dan investasi pada sumber daya manusia anak.

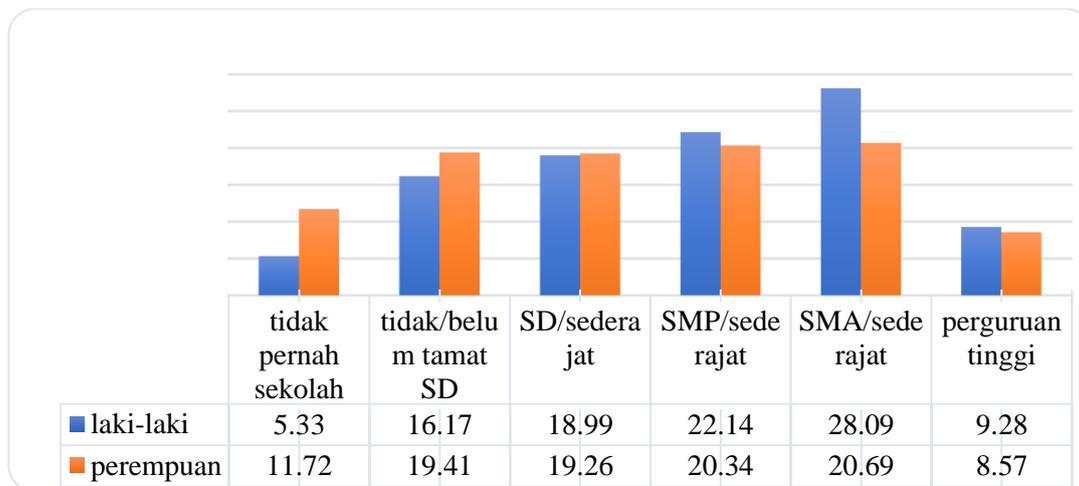
Terdapat setidaknya tiga alasan penting perlunya peningkatan pendidikan perempuan yang memberikan keuntungan dari segi ekonomi, diantaranya sebagai berikut (Todaro, 2011):

1. Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan kaum perempuan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki di mayoritas negara berkembang.
2. Peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja, tetapi juga menghasilkan partisipasi angkatan kerja yang lebih besar, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, serta perbaikan kesehatan dan gizi anak, sehingga bermanfaat bagi generasi berikutnya juga.
3. Kaum perempuan memikul beban kemiskinan yang tidak proporsional. Sehingga setiap peningkatan yang signifikan dalam peran dan status perempuan melalui pendidikan, dapat berdampak penting dalam memutus rantai kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Peningkatan pendidikan perempuan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Perluasan pendidikan dasar anak perempuan menghasilkan tingkat pengembalian tertinggi dari investasi apapun, termasuk investasi

terhadap sebagian besar proyek infrastruktur publik. Selain itu, diperkirakan kerugian yang akan dialami dunia terhadap kegagalan dalam mendidik anak perempuan adalah sekitar \$92 miliar per tahun (Todaro, 2011). Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan bukan hanya persoalan ketidakadilan, tetapi juga memberikan kerugian yang sangat besar dari segi pencapaian tujuan pembangunan.

Kesenjangan gender dalam mengakses pendidikan masih terjadi di Provinsi NTB. Menurut data BPS, Pada tahun 2019 RLS Provinsi NTB untuk laki-laki sebesar 8,06 tahun sedangkan perempuan hanya sebesar 6,58 tahun. Selain ketimpangan yang cukup tinggi, angka RLS perempuan provinsi NTB pada tahun 2019 masih berada di bawah angka RLS perempuan nasional yang sebesar 7,89 tahun serta menempati posisi ke 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Rendahnya RLS salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya penduduk yang putus sekolah, terutama pada jenjang sekolah menengah. Kesenjangan pendidikan juga terlihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan menurut gender.



Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

Gambar 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi NTB Tahun 2019

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menunjukkan bahwa target pemerintah dalam program wajib belajar 12 tahun atau setara dengan jenjang SMA/ sederajat belum terlaksana. Berdasarkan gambar 1, Perempuan yang menamatkan jenjang sekolah menengah persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dimana *gap* terbesar justru berada pada jenjang SMA/ sederajat. Persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat sebesar 28% sedangkan perempuan hanya 20%. Menurut data BPS, APM pada jenjang SMA di Provinsi NTB tahun 2019 juga menunjukkan kondisi serupa, dimana perempuan pada jenjang SMA memiliki persentase APM yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun tidak berbeda secara signifikan. Namun demikian, APM perempuan pada jenjang SMA masih belum dapat dikatakan baik, dimana pada tahun 2019 persentasenya hanya sebesar 65,88 persen.

Komitmen global terhadap masalah pendidikan dan kesetaraan dituangkan dalam *Sustainable Development Goals*

(SDG's) tujuan ke-4 target pertama yakni pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Lebih lanjut, negara-negara di dunia juga berkomitmen untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan sebagaimana yang tertuang dalam SDG's tujuan ke-5, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Pemberdayaan kaum perempuan dapat dilakukan dengan memberikan akses pendidikan yang memadai bagi perempuan.

Salah satu misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 adalah "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Sasarannya berfokus pada meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan strategi di antaranya peningkatan pemerataan pendidikan serta peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan. Jika dikaitkan dengan

indikator pendidikan, adapun target pemerintah daerah dalam RPJMD tersebut salah satunya ialah tercapainya Angka Partisipasi Kasar SMA/ sederajat sebesar 98,13 persen dan Angka Partisipasi Sekolah SMA/ sederajat sebesar 94,57 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan kebijakan umum dan program prioritas dalam RPJMD, dirumuskan sembilan prioritas pembangunan Provinsi NTB tahun 2019-2023. Dua diantaranya meliputi pendidikan berkualitas dan berdaya saing, serta pembangunan dan pemberdayaan gender. Pasal 1 ayat 23 Peraturan Gubernur (Pergub) NTB no 12 tahun 2016 menyebutkan: “Wajib belajar 12 Tahun adalah program pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh penduduk daerah dan merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sebagai pengembangan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun”.

Program wajib belajar 12 tahun telah menjadi prioritas pembangunan sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, nampaknya target tersebut masih belum dapat terealisasi khususnya di Provinsi NTB. Program wajib belajar 12 tahun tidak akan mudah terealisasi apabila persentase ketuntasan penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/ sederajat masih rendah dan persentase tingkat putus sekolah masih tinggi. Pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dan percepatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Pemerataan akses dilakukan melalui kebijakan dan program prioritas guna menurunkan tingkat putus sekolah perempuan serta mendorong perempuan agar bisa lebih lama berada di bangku sekolah. Berbagai kendala yang berkonsekuensi pada tidak dilanjutkannya pendidikan formal

perempuan penting diintervensi. Berinvestasi pada pendidikan akan berdampak positif pada kapasitas individu dan masyarakat dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta kemajuan bangsa.

Nursaptini et al. (2019) menyatakan bahwa budaya patriarki yang sudah melekat di masyarakat menganggap pendidikan bagi laki-laki adalah yang utama dibandingkan pendidikan perempuan. Masalah kultur yang ada di masyarakat menyebabkan akses perempuan untuk mengenyam pendidikan menjadi terhambat. Akbari (2020) menyatakan bahwa pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak perempuan, begitu juga dengan pendapatan rumah tangga dan lokasi tempat tinggal.

Menurut Karisma dalam Dewi, Mulyati, dan Pratikto (2019) ketika terjadi krisis ekonomi, maka anak akan rentan putus sekolah dan yang akan diprioritaskan untuk putus sekolah adalah anak perempuan, dikarenakan cara pandang masyarakat kita yang masih menganggap perempuan hanya akan mengurus rumah tangga/bagian domestik. Penyebab kesenjangan pendidikan salah satunya ialah faktor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari pendidikan masyarakat yang rendah ialah terhambatnya pembangunan baik secara fisik maupun non fisik serta perkembangan masyarakat itu sendiri (Incing dkk, 2015).

Kesiapan sumber daya manusia dikhawatirkan tidak akan mampu mengimbangi arus perkembangan dan daya saing baik secara nasional maupun internasional apabila tingkat ketuntasan belajar masih rendah. Lebih lanjut, untuk menciptakan pembanguann yang tidak bias gender, kesetaraan hak bagi

laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan perlu menjadi

perhatian. Pendidikan bagi perempuan memberikan beragam dampak positif, bukan hanya bagi personal perempuan, tetapi juga bagi lingkungan keluarga/rumah tangga, lingkungan masyarakat, regional, dan nasional. Secara kultural budaya patriarki masih melekat kuat di masyarakat dan sangat berpotensi merugikan hak-hak

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bagi perempuan berarti memberikan akses berupa bimbingan dan pengajaran ilmu pengetahuan kepada perempuan agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan pendidikan yang memadai, seorang perempuan dapat menjalankan tugas kehidupannya di lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan baik (Setyowasih, 2017).

Program wajib belajar 12 tahun merupakan strategi pembangunan nasional untuk peningkatan daya saing regional pada periode 2014-2019. Jika ditinjau dari RPJP nasional, program wajib belajar 12 tahun merupakan implementasi prioritas kedua pembangunan nasional pendidikan yaitu peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah. Memasuki tahun 2013, pemerintah mencanangkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai rintisan Program wajib belajar 12 tahun. Program PMU bertujuan untuk memperluas akses masyarakat memperoleh pendidikan menengah atau SMA/ sederajat. Perluasan akses diperlukan dikarenakan rendahnya

perempuan. Selain itu, faktor sosial lainnya diduga turut memengaruhi akses perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun pada perempuan di Provinsi NTB tahun 2019.

angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/ sederajat. Target PMU adalah tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya 97% pada tahun 2020 (Marliyah, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan menurut Brock dan Cammish (1997). Di antaranya adalah faktor geografis, sosial-budaya, dan faktor ekonomi. Wilayah geografis dapat memengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan. Kesenjangan spasial yang cukup besar berhubungan langsung dengan kesulitan akses fisik yang lebih merugikan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Dikotomi perkotaan dan pedesaan yang menyeluruh dan mendalam memberikan keuntungan bagi kota-kota besar, terutama dalam hal penyediaan sekolah menengah untuk anak perempuan. dengan kata lain, wilayah perkotaan lebih mendapat perhatian serta menyediakan faktor penunjang dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah pedesaan sehingga ikut memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan (Brock dan Cammish, 1997).

Aspek sosial-budaya merupakan faktor lain yang juga memengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan. Salah satu penghalang utama bagi perempuan untuk memiliki kesempatan mengenyam pendidikan

adalah bias budaya fundamental yang hampir universal yang mendukung laki-laki. Berkembangnya sistem patriarki, pernikahan dini adat, kehamilan dini, tugas domestik dan subsisten bagi perempuan (terutama di daerah pedesaan), apresiasi yang lebih rendah terhadap nilai kehidupan perempuan, semua itu turut memengaruhi partisipasi anak perempuan dan anak perempuan dalam pendidikan formal. Kendala tersebut dihadapi oleh kalangan perempuan secara terus menerus mengakibatkan kelangkaan panutan perempuan yang dapat menantang panutan tradisional yang jelas-jelas diperoleh oleh kedua jenis kelamin pada usia yang sangat dini (Brock dan Cammish, 1997).

Bersama dengan bias sosial-budaya mendasar yang berpihak pada laki-laki, faktor ekonomi, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan kelaparan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk menyekolahkan anak perempuan dianggap oleh orang tua sebagai hambatan serta hilangnya peran penting perempuan di rumah maupun di lahan. Karena dominasi patriarki dan patrilokal, investasi pendidikan formal bagi anak perempuan dianggap pemborosan karena menguntungkan keluarga yang dinikahi anak perempuan daripada keluarganya sendiri (Brock dan Cammish, 1997).

Terdapat beberapa macam faktor yang memengaruhi tingkat putus sekolah perempuan menurut Karim dan Shahidul (2015), di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor rumah tangga, dan faktor budaya. Kontribusi perempuan sebagai kepala rumah tangga untuk membuat keputusan turut meningkatkan kelangsungan pendidikan

anak perempuan. Namun, terdapat penelitian lain menunjukkan hasil yang bertolak belakang di mana rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tunggal menghadapi kendala keuangan dan waktu yang lebih besar daripada rumah tangga dengan dua orang tua sehingga memberikan dampak berbeda terhadap prestasi akademik anak. Kemudian faktor budaya terdiri dari kepercayaan dan kehamilan dini. Faktor budaya juga meliputi nilai-nilai tradisi daerah setempat. UNESCO (*United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization*) dalam Karim dan Shahidul (2015:31) menyatakan bahwa nilai-nilai tradisi lebih kuat di daerah pedesaan (rural) di negara berkembang dibandingkan dengan daerah perkotaan (urban) dan seringkali masyarakat melarang perempuan meninggalkan rumah mereka bahkan untuk bersekolah. Faktor-faktor tersebut akan berdampak pada hasil pendidikan dari anak perempuan. Hasil pendidikan yang dimaksud diantaranya adalah rendahnya tingkat pembelajaran (*low learning*), tingkat prestasi/pencapaian (*low achievement*), dan tingkat prestasi akademik (*low academic performance*)

Radhika Kapur (2018:1) menyatakan bahwa peningkatan pendidikan dan keterampilan literasi anak perempuan terutama didasarkan pada faktor-faktor di antaranya sosial ekonomi, sosial budaya, dan tingkat pendidikan orang tua. Faktor-faktor ini mempengaruhi partisipasi anak perempuan di sekolah dan dalam meningkatkan keterampilan serta kemampuan pendidikan mereka. Ada sejumlah masalah sosial, ekonomi, keluarga, budaya dan pendidikan yang terbukti menjadi hambatan dalam proses perolehan pendidikan oleh perempuan dan memaksa mereka untuk putus sekolah.

2.2 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mencakup wilayah Provinsi NTB tahun 2019. Unit analisis dalam penelitian ini adalah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di Provinsi NTB yang menjadi sampel dalam Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Maret tahun 2019. Sumber

data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, meliputi *raw data* dari kuesioner Susenas KOR dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (KP). Berikut merupakan tabel variabel penelitian.

Tabel 1. Pengkategorian variabel penelitian

No	Variabel	Penjelasan	Nilai dummy
(1)	(2)	(3)	(4)
Variabel tak bebas			
1	Status ketuntasan wajib belajar 12 tahun	1= tidak tuntas 2= tuntas*	1 0
Variabel bebas			
2	Status kemiskinan (X1)	1= miskin 2= tidak miskin*	1 0
3	Daerah tempat tinggal (X2)	1= perdesaan 2= perkotaan*	1 0
4	Jumlah ART (X3)	Numerik	
5	Jenis kelamin KRT (X4)	1= laki-laki 2= perempuan*	1 0
6	Tingkat pendidikan KRT (X5)	1= tidak tamat SMA/ sederajat 2= tamat SMA/ sederajat ke atas*	1 0
7	Lapangan usaha KRT (X6)	1= tidak bekerja 2= pertanian 3= non pertanian*	1 0 0 1 0 0
8	Status pernikahan dini (X7)	1= menikah di usia dini 2= tidak menikah di usia dini *	1 0

Keterangan: *) kategori referensi

2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) statistik yakni SPSS dan *Microsoft Excel*. Sebagian besar analisis dilakukan menggunakan *software* SPSS seperti melakukan inferensia model dan membuat tabulasi silang. Sedangkan *microsoft excel* digunakan untuk

melakukan visualisasi terhadap tabulasi silang yang dihasilkan dari pengolahan menggunakan SPSS dalam bentuk diagram sehingga lebih mudah dipahami.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan persentase status ketuntasan wajib belajar 12 tahun pada perempuan yang berusia 18 tahun ke atas di Provinsi NTB tahun 2019, baik secara umum maupun menurut variabel-variabel bebas. Hasil analisis deskriptif akan disajikan dalam bentuk diagram

batang. Sedangkan analisis inferensia digunakan untuk mengestimasi model serta mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Provinsi NTB tahun 2019. Analisis inferensia menggunakan metode regresi logistik biner. Model regresi logistik biner yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 \quad (1)$$

- Uji simultan

Tahapan selanjutnya adalah pengujian parameter secara simultan. Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Provinsi NTB tahun 2019. Uji simultan dilakukan menggunakan uji *Likelihood Ratio* (G) dengan rumus sebagai berikut:

$$G = -2 \ln \left(\frac{L_0}{L_1} \right) \sim X^2_p \quad (2)$$

Adapun hipotesis dalam pengujian parameter secara simultan adalah:

H₀: $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_7 = 0$ (tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun)

H₁: minimal terdapat 1 $\beta_j \neq 0$ dimana $j = 1, 2, \dots, 7$ minimal terdapat satu variabel bebas atau interaksi dua variabel bebas yang berpengaruh

pada kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun).

Jika hasil perhitungan menghasilkan nilai $G > X^2_{0,05;8}$ atau ketika nilai *p-value* $< \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

- Uji parsial

Ketika hasil uji simultan memberikan keputusan tolak H₀, maka pengujian dilanjutkan dengan uji parsial. Uji parsial bertujuan untuk menghitung koefisien regresi serta mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Provinsi NTB tahun 2019. Uji parsial menggunakan statistik uji *Wald* dengan rumus sebagai berikut:

$$W_j^2 = \left(\frac{\hat{\beta}_j}{\widehat{Se}\hat{\beta}_j} \right)^2 \sim X^2_{(1)} \quad (3)$$

Adapun hipotesis yang diuji adalah:

H₀: $\beta_j = 0$, untuk $j = 1, 2, \dots, 7$ (tidak ada pengaruh variabel bebas ke-j terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun)

H₁: $\beta_j \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas ke-j terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun)

H₀ akan ditolak ketika $W^2 > X^2_{0,05;1}$ atau *p-value* $< \alpha$. Hal ini berarti variabel bebas ke-j memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

- Uji kesesuaian model

Berikutnya dilakukan uji kesesuaian model (*goodness of fit test*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah model yang terbentuk sudah cukup sesuai untuk menjelaskan variabel tak bebas. Statistik uji yang digunakan adalah uji Hosmer dan Lemeshow dengan rumus sebagai berikut:

$$\hat{C} = \sum_{k=1}^g \frac{(O_k - n'_k \bar{\pi}_k)^2}{n'_k \bar{\pi}_k (1 - \bar{\pi}_k)} \sim X^2_{(g-2)} \quad (4)$$

Adapun hipotesis yang diuji adalah:

- H₀: model telah sesuai
- H₁: model tidak sesuai

H₀ akan ditolak ketika $\hat{C} > X^2_{0,05;8}$ atau *p-value* < α . Dalam uji kesesuaian model, keputusan yang diharapkan adalah gagal tolak H₀. Keputusan gagal

tolak H₀ memberikan arti bahwa model yang diajukan telah sesuai dengan data.

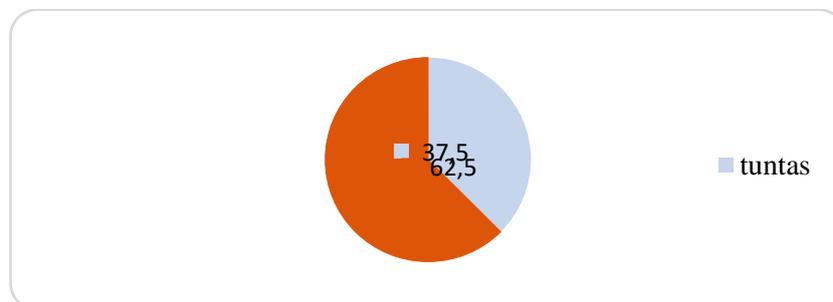
Selain itu, juga dilihat efektivitas model berdasarkan tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi digunakan untuk mengetahui seberapa efektif model yang terbentuk untuk menjelaskan kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Dari tabel klasifikasi, diperoleh nilai *overall percentage* yang digunakan untuk melihat seberapa tepat data dikelompokkan secara benar oleh model.

- Odds rasio

Interpretasi pada persamaan regresi logistik biner dilakukan melalui nilai $\exp(\hat{\beta}_j)$ atau disebut juga dengan *odds* rasio. *Odds* rasio menyatakan besarnya kecenderungan untuk masing-masing variabel bebas yang memengaruhi status ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun pada perempuan usia 18 tahun ke atas di Provinsi NTB tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Status Ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Perempuan



Sumber: hasil olah data Susenas 2019

Gambar 2. Persentase Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun ke Atas Menurut Status Ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Hasil pengolahan data Susenas 2019 menunjukkan bahwa perempuan usia 18 tahun ke atas di Provinsi NTB yang tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebesar 62,50 persen, sedangkan sisanya yakni sebesar 37,50

persen telah menuntaskan wajib belajar 12 tahun atau hingga jenjang SMA/ sederajat. Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui bahwa persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun perempuan masih tinggi.

Tabel 2. Gambaran Umum Status Ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Perempuan Usia 18 Tahun Ke Atas Di Provinsi NTB Menurut Variabel Bebas

No	Variabel	Kategori	Status ketuntasan (dalam %)	
			tidak tuntas	Tuntas
1	Status kemiskinan (X1)	Miskin	75,50	24,50
		Tidak miskin	60,80	39,20
2	Daerah tempat tinggal (X2)	Perdesaan	68,60	31,40
		Perkotaan	54,60	45,40
3	Jumlah ART (X3)	5 orang ke atas	58,10	41,90
		Maksimal 4 orang	65,00	35,00
4	Jenis kelamin KRT (X4)	Laki-laki	63,30	36,70
		Perempuan	49,50	50,50
5	Tingkat pendidikan KRT (X5)	Tidak tamat SMA/ sederajat	78,90	21,10
		Tamat SMA/ sederajat ke atas	33,80	66,20
5	Lapangan usaha KRT (X6)	Tidak bekerja	56,40	43,60
		pertanian	74,60	25,40
		Non pertanian	54,10	45,90
6	Status pernikahan dini (X7)	Menikah di usia dini	67,90	32,10
		Lainnya	29,30	70,70

Sumber: hasil olah data Susenas 2019

- Status kemiskinan
Berdasarkan tabel 1, perempuan usia 18 tahun ke atas yang tinggal dalam rumah tangga miskin memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang lebih tinggi yakni sebesar 75,50 persen, dibandingkan perempuan usia 18 tahun ke atas yang tinggal dalam tangga tidak miskin yang sebesar 60,80 persen.
- Daerah tempat tinggal
Perempuan usia 18 tahun ke atas yang tinggal di daerah perdesaan memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang lebih tinggi yakni sebesar 68,60 persen, dibandingkan perempuan usia 18 tahun ke atas yang tinggal di daerah perkotaan yang sebesar 54,60 persen.
- Jumlah ART
Untuk kepentingan analisis deskriptif, variabel numerik jumlah ART dibuat menjadi dua kategori. Perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki ART maksimal 4 orang, memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang lebih tinggi yakni sebesar 68,60 persen, dibandingkan perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki ART 5 orang ke atas yang sebesar 58,10 persen.

- Jenis kelamin KRT
Perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT laki-laki memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang lebih tinggi yakni 65,00 persen, dibandingkan perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT perempuan yang sebesar 49,50 persen.
- Tingkat pendidikan KRT
Perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT dengan pendidikan tidak tamat SMA/ sederajat memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang lebih tinggi, yakni sebesar 78,90 persen, dibandingkan perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT berpendidikan minimal tamat SMA/ sederajat yang sebesar 33,80 persen.
- Lapangan usaha KRT
Perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT yang bekerja di lapangan usaha pertanian

memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang paling tinggi yakni 74,60 persen, disusul KRT yang tidak bekerja dengan persentase sebesar 56,40 persen, kemudian KRT yang bekerja di lapangan usaha non pertanian yaitu sebesar 54,10 persen.

- Status pernikahan dini
Perempuan usia 18 tahun ke atas yang telah menikah di usia dini memiliki persentase ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun yang lebih tinggi yakni 67,90 persen, dibandingkan perempuan usia 18 tahun ke atas yang tidak menikah di usia dini yang sebesar 29,30 persen.

3.2 Variabel-Variabel yang Memengaruhi Ketidaktuntasan Wajib Belajar 12 Tahun pada Perempuan Usia 18 Tahun ke Atas di Provinsi NTB Tahun 2019

Tabel 3. Hasil Uji Parsial

	Variabel	β	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(β)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Step 1	Status kemiskinan	0,442	0,101	19,212	1	0,000	1,556
	Daerah tempat tinggal	0,230	0,062	13,632	1	0,000	1,259
	Jumlah ART	-0,147	0,019	61,134	1	0,000	0,864
	Jenis kelamin KRT	1,105	0,119	86,508	1	0,000	3,020
	Tingkat pendidikan KRT	1,931	0,063	938,688	1	0,000	6,896
	Lapangan usaha KRT 1	-0,098	0,100	0,963	1	0,326	0,907
	Lapangan usaha KRT 2	0,252	0,069	13,373	1	0,000	1,287
	Status pernikahan dini	0,217	0,062	12,351	1	0,000	1,242
	Konstanta	-1,384	0,150	84,768	1	0,000	0,250

Sumber: hasil olah data Susenas 2019

Berdasarkan tabel hasil pengujian parsial, dapat dibentuk suatu

persamaan regresi logistik biner sebagai berikut:

$$\hat{g}(X) = -1,384^* + 0,442X_1^* + 0,23X_2^* - 0,147X_3^* + 1,105X_4^* + 1,931X_5^* - 0,098X_{61} + 0,252X_{62}^* + 0,217X_7^*$$

Keterangan: (*) signifikan pada $\alpha=5\%$

Berdasarkan tabel pada lampiran 3, diperoleh nilai G sebesar 1535,588. Karena nilai $G (1535,588) > \chi^2_{(8)} (15,507)$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, dari sebanyak 8 variabel bebas yang dimasukkan di dalam model minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Provinsi NTB tahun 2019.

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian secara parsial dari delapan variabel bebas yang digunakan. Pada tingkat kepercayaan 95 persen, dari delapan variabel bebas yang digunakan, terdapat sebanyak tujuh variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Variabel-variabel bebas yang signifikan merupakan variabel bebas dengan nilai signifikansi (*p-value*) kurang dari 0,05 atau nilai uji wald lebih besar dari *chi-square* tabel $\chi^2_{(0,05;1)}$ sebesar 3,841. Tujuh variabel bebas yang berpengaruh tersebut di antaranya adalah status kemiskinan (X1), daerah tempat tinggal (X2), jumlah ART (X3), jenis kelamin KRT (X4), tingkat pendidikan KRT (X5), lapangan usaha KRT kategori pertanian (X62), dan status pernikahan dini (X7).

Berdasarkan tabel pada lampiran 3, hasil pengujian kesesuaian model dengan *Hosmer and Lemeshow test* menunjukkan nilai \hat{C} yang diperoleh sebesar 8,645. Karena nilai $\hat{C} < \chi^2_{(8)} (15,507)$, maka dapat disimpulkan bahwa model telah sesuai, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Tabel klasifikasi digunakan

untuk melihat seberapa efektif model yang terbentuk untuk menjelaskan kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan lampiran 3, diperoleh nilai *overall percentage* dari model adalah 74,4 persen. Hal ini berarti model yang dibentuk dapat mengklasifikasikan data dengan benar sebanyak 74,4 persen.

Nilai *odds* rasio digunakan untuk melihat perbedaan kecenderungan perempuan usia 18 tahun ke atas untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun. berdasarkan tabel uji parsial, nilai *odds* rasio untuk setiap variabel bebas dapat dilihat pada kolom $Exp(\beta)$ dengan penjelasan sebagai berikut:

- Status kemiskinan
Nilai *odds ratio* untuk variabel status kemiskinan sebesar 1,556 dengan kategori referensi yaitu tidak miskin. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas yang berasal dari rumah tangga miskin memiliki kecenderungan sebesar 1,556 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dibandingkan dengan perempuan yang berasal dari rumah tangga tidak miskin dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- Daerah tempat tinggal
Nilai *odds ratio* untuk variabel daerah tempat tinggal sebesar 1,259 dengan kategori referensi yaitu perkotaan. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas yang tinggal di perdesaan memiliki kecenderungan sebesar 1,259 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di perkotaan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

- Jumlah ART
 Nilai *odds ratio* untuk variabel jumlah ART sebesar 0,864. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas dalam rumah tangga dengan ART lebih banyak 1 orang memiliki kecenderungan sebesar 0,864 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Rahma dan Arcana (2020) yang menyatakan bahwa remaja dalam rumah tangga dengan jumlah ART maksimal 4 orang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami putus sekolah dibandingkan remaja dalam rumah tangga dengan jumlah ART lebih dari 4 orang.
 - Jenis kelamin KRT
 Nilai *odds ratio* untuk variabel jumlah ART sebesar 3,020. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT laki-laki memiliki kecenderungan sebesar 3,020 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dibandingkan dengan perempuan yang memiliki KRT perempuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
 - Tingkat pendidikan KRT
 Nilai *odds ratio* untuk variabel tingkat pendidikan KRT sebesar 6,896 dengan kategori referensi yaitu tamat SMA/ sederajat ke atas. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas yang memiliki KRT dengan pendidikan tidak tamat SMA/ sederajat memiliki kecenderungan sebesar 6,896 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dibandingkan dengan perempuan yang memiliki KRT dengan pendidikan tamat SMA/ sederajat ke atas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
 - Lapangan usaha KRT kategori pertanian
 Nilai *odds ratio* untuk variabel lapangan usaha KRT kategori pertanian sebesar 1,287 dengan kategori referensi yaitu non pertanian. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas yang dengan KRT yang bekerja di lapangan usaha pertanian memiliki kecenderungan sebesar 1,287 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dibandingkan dengan perempuan yang memiliki KRT yang bekerja di kategori lainnya dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
 - Status pernikahan dini
 Nilai *odds rasio* untuk variabel status pernikahan dini sebesar 4,500 dengan kategori referensi yaitu tidak menikah di usia dini. Artinya perempuan usia 18 tahun ke atas yang melakukan pernikahan di usia dini memiliki kecenderungan sebesar 4,500 kali untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dibandingkan dengan perempuan tidak menikah di usia dini dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
1. Karakteristik perempuan usia 18 tahun ke atas yang tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Provinsi NTB tahun 2019, yaitu

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

perempuan usia 18 tahun ke atas yang tinggal dalam rumah tangga dengan kategori miskin, tinggal di daerah perdesaan, memiliki KRT laki-laki, memiliki KRT berpendidikan tidak tamat SMA/ sederajat, memiliki KRT yang bekerja di lapangan usaha pertanian, serta perempuan yang menikah di usia dini.

2. Berdasarkan analisis regresi logistik biner, diperoleh hasil

bahwa variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun pada perempuan di Provinsi NTB tahun 2019 adalah status kemiskinan, daerah tempat tinggal, jumlah ART, jenis kelamin KRT, tingkat pendidikan KRT, lapangan usaha KRT kategori pertanian, dan status pernikahan dini.

REFERENSI

- Akbari, A. R. (2020). *Pengaruh Latar Belakang Orang Tua terhadap Tingkat Pencapaian Pendidikan Anak Perempuan Pertama di Indonesia* [Tesis]. Universitas Airlangga: Jawa Timur.
- Brock, C., & Cammish, N. (1997). *Factors Affecting Female Participation in Education in Seven Developing Countries*. Education Research Paper.
- Dewi, E. A. S., Mulyati, S., & Pratikto, R. (2019). *Pengaruh inflasi terhadap tingkat pendidikan perempuan pada rumah tangga miskin di Jawa Barat: sebuah kajian awal*. Universitas Katolik Parahyangan: Jawa Barat
- Hosmer, David W., Jr. Stanley Lemeshow, dan Rodney X. Sturdivant. (2013). *Applied Logistic Regression* (3rd edition). USA: John Wiley & Sons.
- Incing, V., Hardiyanto, W. T., & Rusmiwari, S. (2015). Kesenjangan Gender (Perempuan) dalam Mendapatkan Pendidikan pada Masyarakat Pedesaan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1). Universitas Tribhuwana Tungadewi: Jawa Timur
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2017). *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's) Indonesia*. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021 melalui http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Ringkasan_Metadata_Indikator_TP.B.pdf
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (Pjp) Tahun 2005 – 2025*. Diakses pada tanggal 5 April 2021 melalui https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf
- Khairunnisa, K. (2018). *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka* [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Malang: Jawa Timur
- Marliyah, L. (2015). Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Dalam Konsep Inovasi Pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 9, pp. 547-564).
- Nursaptini, Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. Universitas Mataram: NTB.
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Gubernur NTB No. 16 tahun 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023

Shahidul, S. M., & Karim, A. H. M. Z. (2015). Factors contributing to school dropout among the girls: A review of literature. *European Journal of research and reflection in educational sciences*, 3(2).

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2011). *Economic Development (11th edition)*. United States: Prantice Hall. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 melalui library.lol/main/59B32C3BE9F4C2B62859D7895A568899

UNESCO. (2012). *World Atlas of Gender Equality of Education*. Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.